

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Proses akuntansi atau tata kelola keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintah saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, (2006).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk

kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan nilai informasi laporan keuangan. Nilai informasi laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan sistem pengendalian yang ada dan pengawasan keuangan daerah. Tidak terlepas pula dari komitmen organisasi.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan

kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain; a) relevan; manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap, b) andal; dapat diverifikasi, penyajian jujur, dan netral, c) dapat dibandingkan, d) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem akan mampu dijalankan secara optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang

berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Selain sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, SIKD Memberikan manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Hal lain yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pengendalian intern Pada pemerintah pusat dan daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian Internal (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas efisiensi dalam proses akuntansi pertama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga Penerapan sistem Pengendalian internal mampu meningkatkan real, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit

laporan keuangan. Adanya Kecurangan yang terjadi menunjukkan indikasi bahwa Pengendalian internal belum berfungsi dengan baik.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan diperlukan media tertentu yang dianggap relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 Tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang diajukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Terhadap sistem Pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan perundang-undangan.

Kawader (2009) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kupang dan telah berhasil mempertahankan WTP untuk kedua kalinya. Namun demikian, tanpa mengurangi capaian tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: a) kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tiga organisasi

perangkat daerah di Kota Kupang; b) penatausahaan atas tagihan jangka panjang Kota Kupang belum tertib; c) penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2020, sehingga BPK tetap memberikan opini WTP.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai Informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan semuanya untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian

akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), peneliti menambah satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Komitmen Organisasi. . Komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan/pegawai untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Kontribusi yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan negara/daerah adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk menyajikan dan

mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki Pemerintah Daerah dengan harapan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi responden terhadap kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi pada pemerintah daerah kota kupang?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?

6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
7. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan Pemerintah Daerah?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi pada pemerintah daerah kota kupang?
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi secara parsial terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai evaluasi dan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.